

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025**



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 245 /2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah terkait adanya pergeseran anggaran baik berkurang maupun bertambah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya dalam rangka mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323];
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
 20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 14);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 1 Juli 2025

 BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 245 /2025
TANGGAL 1 Juli 2025.

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

1.	Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah
2.	Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD
3.	Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah
4.	Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.	Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6.	Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah
7.	Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8.	Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9.	Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan
12.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
14.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial
15.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja
16.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
18.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup
19.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan
22.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
23.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
24.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
26.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

27.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan
28.	Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
29.	Rumah Sakit H. Badaruddin Kasim
30.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung
31.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Murung pudak
32.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanta
33.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Harus
34.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banua Lawas
35.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kelua
36.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pugaan
37.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jaro
38.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Uya
39.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Haruai
40.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Upau
41.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bintang Ara



BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, dimana kami telah dapat menyelesaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025. Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 disusun berdasarkan acuan Rencana Strategis 2025-2029 dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman kepada segenap Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya dalam pelaksanaan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan untuk masa satu tahun dan diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan secara maksimal. Analisis dilakukan secara mendalam pada setiap sasaran untuk memperlihatkan kinerja sesungguhnya, dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi.

Akhirnya, kami berharap dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi seluruh stakeholders dan media dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Tanjung, 03 Juli 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tabalong,

Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720306 199203 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan	9
1.4 Maksud dan Tujuan	9
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TRIWULAN II.....	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025 dan Capaian Renstra SKPD Hingga Triwulan II.....	11
BAB III . RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG.....	19
BAB IV PENUTUP.....	437

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	11
Tabel 2. 2 Realisasi Pendapatan Daerah hingga Triwulan II	14
Tabel 2. 3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah	15
Tabel 3.1 Rekapitulasi Daftar Perubahan Program dan Perubahan Kegiatan pada Rencanan Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rancangan Akhir Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025, sedangkan Perubahan Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUPA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2025.
3. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang

tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain sebagai berikut :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun n-1 dan mengacu RKPD tahun n.
2. Program dalam Rencana Kerja Perubahan SKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun n.
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perubahan SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perubahan SKPD dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dalam pelaksanaan Renja tahun berjalan, ditemukan berbagai kondisi yang dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja 2025. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja

pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan ke dua tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 menggunakan landasan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunannya antara lain:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 927);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 52
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025
22. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/245/2025 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan

Dasar pertimbangan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Adanya pergeseran pagu anggaran belanja antar sub kegiatan untuk menyesuaikan ketepatan penggunaan anggaran terhadap kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan
2. Adanya penyesuaian target kinerja dan alokasi anggaran sebagai tindak lanjut hasil pembaharsan RKPD Kabupaten tabalong Tahun 2025
3. Sinkronisasi arah kebijakan Badan Pendapatan daerah Kabupaten Tabalong dengan Rancangan Renstra Badan Pendapatan daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran awal dari RPJMD tahun 2025-2029

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah untuk penyempurnaan Rencana Kerja untuk menyesuaikan perubahan target terhadap program dan kegiatan dan menyesuaikan perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan perubahan tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong;
2. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Bab III Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI RANCANGAN AKHIR RENJA PERUBAHAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025 dan Capaian Renstra SKPD Hingga Triwulan II

Berdasarkan hasil evaluasi hasil pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja dan pencapaian renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Rancangan Akhir Rencana Kerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2025

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117.648.000	5.537.990	4,71%
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.178.000	4.230.000	20,0%
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.600.000	-	0,0%
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.600.000	-	0,0%
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	1.307.990	65,40%
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000	-	0,0%
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	-	0,0%
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.270.000	-	0,0%
5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.000.000	-	0,0%
5.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	1.000.000	-	0,0%
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.745.393.003	5.398.375.791	27,34%

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.692.543.957	5.375.775.791	27,30%
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	36.855.046	22.600.000	61,32%
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.994.000	-	0,0%
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.522.000	-	0,0%
5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000	-	0,0%
5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.022.000	-	0,0%
5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.500.000	-	0,0%
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	282.785.996	-	0,0%
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	157.785.996	-	0,0%
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	125.000.000	-	0,0%
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.082.560.888	357.569.740	33,03%
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	26.688.570	-	0,0%
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	254.109.405	-	0,0%
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	102.712.429	6.697.700	6,52%
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.200.000	4.360.000	25,35%
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	431.900.484	147.063.040	34,05%
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	249.950.000	199.449.000	79,80%
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	114.580.519	-	0,0%
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.283.730	-	0,0%
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88.296.789	-	0,0%
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.666.449.985	338.875.937	20,34%
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.400.000	2.000.000	23,81%
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	198.500.000	71.791.417	36,17%
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.133.615	-	0,0%
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.411.416.370	424.905.620	30,10%
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.634.727.300	142.376.997	8,71%

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	304.330.000	111.184.597	36,53%
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	148.740.000	23.472.400	15,78%
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.840.000	7.720.000	37,04%
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan Lainnya	1.160.817.300	-	0,0%
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	3.162.513.223	734.026.396	23,21%
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	26.095.684	-	0,0%
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	473.480.000	55.217.816	11,66%
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	465.258.518	47.845.000	10,3%
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	248.760.303	-	0,0%
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	49.904.000	6.852.000	13,73%
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	321.060.000	28.609.427	8,91%
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	169.963.000	62.879.565	37,00%
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	126.027.012	-	0,0%
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	74.213.200	2.420.000	3,3%
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	222.293.178	94.515.000	42,5%
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	593.386.450	361.759.485	60,97%
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	27.262.000	-	0,0%
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	260.009.140	38.355.103	14,75%
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	40.734.000	11.402.000	27,99%
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	64.066.738	24.171.000	37,73%
		27.824.180.914	6.976.762.851	25,07%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong

Adapun capaian pendapatan dari sektor pajak dan retribusi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 2
Realisasi Pendapatan Daerah hingga Triwulan II
Tahun Anggaran 2025

Komponen Pendapatan Daerah	Realisasi Triwulan II
PENDAPATAN DAERAH	1.196.287.925.929
PENDAPATAN ASLI DAERAH	133.534.326.024,99
Pajak Daerah	58.410.788.124
Retribusi Daerah	28.493.008.012,05
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32.859.983.318,94
PENDAPATAN TRANSFER	1.054.252.995.739
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	965.026.437.112
Pendapatan Transfer Antar Daerah	89.226.558.627
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.500.604.165
Pendapatan Hibah	8.500.604.165

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian kinerja seluruh program Badan Pendapatan Daerah sebagian sudah mencapai target yang sesuai dengan rencana aksi. Hasil evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah
Pencapaian Renstra s/d Tahun 2025 (Triwulan II)

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (1-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (1-1) yang direvaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang direvaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025/Alm. Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)					
					5		6		7		8		9		10			11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15= 14/6 x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Semua Bidang																											
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai AKOP (Nilai)	5,00	-	5,00	-	5	24.861.687.631	1544.908.325	4.435.056.230	-	-	-	-	5	6.379.957.555	100,00%	26,97%	5,00	6.379.957.555	-	-	0,00%	0,00%		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat	-	-	0,00	-	33	117.648.000	11	1.307.390	12	4.230.000	-	-	23	5.537.390	68,70%	4,76%	0,00	5.537.390	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		Pengusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	0,00	-	9	21175.000	2	-	2	4.230.000	-	-	4	4.230.000	44,44%	19,97%	0,00	4.230.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Pengusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengusunan	-	-	0,00	-	1	1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Pengusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengusunan Dokumen Perubahan	-	-	0,00	-	1	1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Pengusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengusunan	-	-	0,00	-	1	2.000.000	1	1.307.390	-	-	-	-	1	1.307.390	100,00%	65,40%	1,00	1.307.390	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Pengusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengusunan Dokumen Perubahan	-	-	0,00	-	1	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Pengusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengusunan Laporan Capaian Kinerja dan	-	-	0,00	-	8	3.000.000	4	-	2	-	-	-	6	-	75,00%	0,00%	5,00	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0,00	-	10	84.270.000	4	-	4	-	-	-	8	-	80,00%	0,00%	5,00	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

	Penyenggaraan Wakil Pendukung Statistik Sektorial Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wakil Pendukung Statistik Sektorial Daerah (Dokumen)			-	0,00	-	1	1.000.000	-	-	1	-				1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	*Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa (Lengkap Perangkat Daerah (Data))			-	0,00	-	1	1.000.000	-	-	1	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah (20 Dokumen)			-	0,00	-	19	16.745.383.003	4	1.356.662.086	5	4.015.113.656	-	-		9	5.375.775.791	47,37%	27,23%	0,00	5.375.775.791	0,00%	0,00%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menemua Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)			-	0,00	-	32	19.692.543.957	32	1.334.962.096	43	4.015.113.656				76	5.363.175.791	100,00%	27,18%	75,00	5.363.175.791	0,00%	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)			-	0,00	-	1	36.885.048	-	22.600.000	-	-				-	22.600.000	0,00%	61,32%	0,00	22.600.000	0,00%	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)			-	0,00	-	18	15.994.000	4	-	5	-				9	-	60,00%	0,00%	9,00	-	0,00%	0,00%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadministrasian Barang Milik Daerah (Bulan)			-	0,00	-	169	17.822.000	32	-	30	-	-	-		62	-	41,33%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
	Penyusunan Pencantolan Kelengkapan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kelengkapan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			-	0,00	-	69	2.000.000	10	-	10	-				20	-	33,33%	0,00%	20,00	-	0,00%	0,00%
	Rakonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rakonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			-	0,00	-	29	8.022.000	7	-	9	-				12	-	46,00%	0,00%	12,00	-	0,00%	0,00%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			-	0,00	-	65	7.500.000	15	-	15	-				30	-	46,15%	0,00%	20,00	-	0,00%	0,00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Bulan)			-	0,00	-	12	232.786.996	-	-	-	-	-	-		-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
	Pengadaan Pakuan Dinas Beasera Akibat Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakuan Dinas Beasera Akibat Kelengkapannya (Paket)			-	0,00	-	5	157.786.996	-	-	-	-	-	-		-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			-	0,00	-	20	125.000.000	-	-	-	-	-	-		-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bulan)			-	0,00	-	12	1.082.550.886	3	237.683.855	3	110.885.885	-	-		6	357.569.740	50,00%	33,08%	0,00	357.569.740	0,00%	0,00%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisalkan (Paket)			-	0,00	-	4	26.888.570	-	-	-	-	-	-		-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
	Penyediaan Perabotan dan Peralengkapan Kantor	*Jumlah Paket Perabotan dan Peralengkapan Kantor yang Didisalkan (Bulan)			-	0,00	-	4	254.138.406	1	-	-	-	-	-		1	-	25,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%

Rancangan Akhir Rencana Kerja 2025 | Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	0,00	-	4	102.712.429	1	200.000	1	6.497.700				2	5.997.700	50,00%	6,52%	2,00	6.697.700	0,00%	0,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	-	0,00	-	4	17.200.000	1	2.430.000	1	1.930.000				2	4.360.000	50,00%	25,36%	2,00	4.360.000	0,00%	0,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	-	0,00	-	136	431.900.484	2	35.004.655	33	111.458.165				35	147.063.040	25,36%	34,05%	35,00	147.063.040	0,00%	0,00%
Penatausahaan Arasp Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arasp Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	0,00	-	4	249.950.000	1	199.449.000	4	-				5	199.449.000	100,00%	79,80%	5,00	199.449.000	0,00%	0,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah (Persen)	-	0,00	-	12	114.580.519	3	-	3	-	-	-	-	6	-	50,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	0,00	-	2	25.283.730	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	0,00	-	13	88.296.786	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan (Persen)	-	0,00	-	12	1.666.449.985	-	303.548.951	-	195.148.089	-	-	-	-	498.697.037	0,00%	29,83%	0,00	498.697.037	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	0,00	-	4	8.400.000	1	2.000.000	-	-				1	2.000.000	25,00%	23,81%	1,00	2.000.000	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	0,00	-	12	199.500.000	3	36.454.431	3	35.326.598				6	71.751.417	50,00%	36,17%	6,00	71.751.417	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	0,00	-	4	48.133.615	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	0,00	-	12	1.411.418.370	3	285.064.620	3	159.821.100				6	424.905.620	50,00%	30,10%	6,00	424.905.620	0,00%	0,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	-	0,00	-	12	1.634.727.300	3	45.698.433	3	96.678.564	-	-	-	6	142.376.997	50,00%	8,71%	0,00	142.376.997	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Bayu Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Penorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Penorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	-	0,00	-	30	304.330.000	27	38.806.533	3	72.379.064				30	111.184.597	100,00%	36,50%	30,00	111.184.597	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Bayu Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perbaikannya (Unit)	-	0,00	-	15	148.740.000	3	4.046.900	3	19.425.500				6	23.472.400	40,00%	15,78%	6,00	23.472.400	0,00%	0,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	0,00	-	21	20.940.000	5	2.945.000	-	4.675.000				5	7.720.000	23,91%	37,04%	5,00	7.720.000	0,00%	0,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (Unit)	-	0,00	-	1	1.160.817.300	-	-	1	-				1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	91,68%	25,67%			
Predikat Kinerja																	Rendah	Tinggi	Rendah		

Rancangan Akhir Rencana Kerja 2025 | Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong

[illegible]

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong

BAB III

RANCANGAN AWAL

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN TABALONG

Dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025, ada beberapa kegiatan yang bertambah dan ada juga yang mengalami perubahan dari segi target dan anggaran, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Target Indikator Nilai AKIP adalah 80,36 (A), berubah indikatornya menjadi Nilai Kepuasan terhadap Pelayanan Kesekretariatan 100%
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Target Indikator Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah dengan target 23 dokumen berubah menjadi 39 dokumen. Indikator ini juga mengalami perubahan menjadi Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja (%)
 - 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Pada saat APBDP 2025 ini mengalami perubahan dari pagu kegiatannya Rp. 65.596.000,00,- menjadi Rp. 18.938.000,00,- dengan target kinerja jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah awalnya sebanyak 9 dokumen untuk Sub Kegiatan ini. Pengurangan tersebut untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa.
 - 1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. Pada Saat APBDP 2025 ini mengalami perubahan dari pagu kegiatannya Rp. 1.600.000,- menjadi Rp. 500.000,- dengan pengurangan untuk Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat.
 - 1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKP. Pada Saat APBDP 2025 ini mengalami perubahan dari pagu kegiatannya Rp. 1.600.000,- menjadi Rp. 500.000,- dengan pengurangan untuk Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat.
 - 1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD. Pada Saat APBDP 2025 ini mengalami perubahan dari pagu kegiatannya Rp. 2.000.000,- menjadi Rp. 1.350.000,- dengan pengurangan untuk

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat.

- 5.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD. Pada Saat APBDP 2025 ini tidak mengalami perubahan dari pagu kegiatannya Rp. 2.000.000,-.
 - 6.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Pada Saat APBDP 2025 ini mengalami perubahan dari pagu kegiatannya Rp. 3.000.000,- menjadi Rp. 760.000,- dengan pengurangan pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat.
 - 7.1 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Pada Saat APBDP 2025 ini mengalami perubahan dari pagu kegiatannya Rp. 84.270.000,00 menjadi 83.150.000,00 dengan pengurangan pada Belanja Makanan dan Minuman Rapat.
 - 8.1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah. Pada Saat APBDP 2025 ini perubahan dari pagu kegiatannya Rp. 1.000.000,- menjadi Rp. 300.000,- dengan pengurangan pada Belanja Makanan dan Minuman Rapat.
 - 9.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah. Pada Saat APBDP 2025 ini perubahan dari pagu kegiatannya Rp. 1.000.000,- menjadi Rp. 300.000,- dengan pengurangan pada Belanja Makanan dan Minuman Rapat.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Target Indikator Terpenuhinya Administrasi Keuangan selama 12 bulan. Indikator ini berubah menjadi Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu (%)
- 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Pada sub kegiatan ini pada APBDP 2025 mengalami perubahan dari pagu awal Rp. 19.692.543.957,- menjadi Rp. 15.956.325.000,-. Pengurangan pagu untuk belanja Gaji Pokok PNS, Belanja Gaji Pokok PPPK, Belanja Tunjangan Fungsional PNS, Belanja Tunjangan Fungsional PPPK, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS, Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS, Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS. Pada Penambahan pagu untuk Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS dan Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS. Target indikator pada sub kegiatan ini juga untuk jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN yang 32 Orang/ Bulan.
 - 2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Pada sub kegiatan ini pada APBDP 2025 mengalami perubahan dari pagu awal Rp. 90.000.000,- menjadi Rp.36.855.046,-.

Pengurangan pagu untuk Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

- 2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD. Pada sub kegiatan ini pada APBDP 2025 mengalami perubahan dari pagu awal Rp. 25.000.000,- menjadi Rp. 15.994.000,-. Pengurangan pagu untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa.
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Target Indikator Terlaksananya Pengadministrasian Barang Milik Daerah 100%. Indikatornya berubah menjadi Persentase pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD) yang akurat lengkap dan mutakhir (%) 100%
 - 3.1 Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD. Pada sub kegiatan ini untuk APBDP 2025 tidak mengalami perubahan dari pagu awal yaitu Rp. 2.000.000,-.
 - 3.2 Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD. Pada sub kegiatan ini pada APBDP 2025 mengalami perubahan dari pagu awal Rp. 8.022.000,- menjadi Rp. 41.430.000,-. Penambahan pagu untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa.
 - 3.3 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. Pada sub kegiatan ini pada APBDP 2025 mengalami perubahan dari pagu awal Rp. 7.500.000,- menjadi Rp. 4.537.119,-. Pengurangan pagu untuk Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover.
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Target Indikator Terlaksananya Administrasi Kepegawaian 100%. Indikatornya berubah menjadi Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi 100%
 - 4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Selengkapannya. Pada sub kegiatan ini pada APBDP 2025 mengalami perubahan dari pagu awal Rp. 157.785.996,- menjadi Rp. 170.714.232,- penambahan pagu ini guna pembelian pakaian batik/sasirangan hari jadi Tabalong dan Belanja Pakaian Olahraga. Target indikator ini dari sebelumnya yaitu 3 paket bertambah menjadi 5 paket.
 - 4.2 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Pada perubahan ini mengalami pengurangan pagu sebesar Rp. 33.824.000,00,- dari pagu awal Rp. 158.824.000,- menjadi Rp. 125.000.000,-. Pengurangan pagu ini untuk Belanja

Perjalanan Dinas Biasa. Target kinerja juga mengalami perubahan, untuk jumlah pegawai berdasar tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sebelumnya 28 orang menjadi 20 orang.

- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Target Indikator Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum 100%. Indikatornya berubah menjadi Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP (%) 100%
- 5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, terdapat pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 5.161.200,- dari Rp. 35.870.100,- menjadi Rp. 30.708.900,-. Untuk indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan tidak mengalami perubahan, tetap 4 paket.
- 5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Terdapat pengurangan pagu belanja sebesar Rp. 18.520.887,- dari Rp. 309.833.610,- menjadi Rp. 291.312.723,-. Pengurangannya berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover.
- 5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Pada sub kegiatan ini terdapat pengurangan pagu sebesar Rp. 17.532.013,- dari pagu awal Rp. 121.400.811,- menjadi Rp. 103.868.798,-. Target indikator kinerja pada sub kegiatan ini yaitu jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan tidak mengalami perubahan, tetap 4 paket.
- 5.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Pada sub kegiatan ini merupakan kegiatan yang baru di Tahun 2025 ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.200.000,- menjadi Rp. 18.200.000,-. Target indikator kinerja Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan sebanyak 4 Dokumen.
- 5.5 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Pada sub kegiatan ini terdapat pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 200.142.516,- dari pagu Rp. 790.568.000,- menjadi Rp. 590.425.484,-. Pengurangan anggaran ini terdiri dari belanja perjalanan dinas biasa dan belanja perjalanan dinas dalam kota untuk kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong. Target indikator kinerja jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD mengalami perubahan dari 171 laporan menjadi 138 laporan.

- 5.6 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD. Pada sub kegiatan ini terdapat pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 249.950.000,- menjadi Rp. 199.950.000,-. Pengurangan anggaran ini terdiri dari Belanja Modal Alat Kantor Lainnya. Target indikator kinerja Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Paket.
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Target Indikator Tersedianya Barang Milik Daerah 100%. Indikatornya berubah menjadi Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan (%) 100%
- 6.1 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 15.892.425,-, dari pagu awal Rp. 26.283.730,- menjadi Rp. 42.176.155,-, yang berisi penambahan belanja modal personal komputer, belanja modal komputer unit lainnya. Target indikator kinerja Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan sebanyak 2 Unit.
- 6.2 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 76.488.181,- dari Rp. 88.296.789,- menjadi Rp. 164.784.970,- untuk Penambahan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain.
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Target Indikator Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 100%. Indikator ini berubah menjadi Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan (%) 100%
- 7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Pada sub kegiatan ini tidak mengalami perubahan. Pagu anggarannya tetap Rp. 8.400.000,- dengan target indikator kinerja jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 4 laporan.
- 7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Pada sub kegiatan ini tidak mengalami perubahan, pagu anggarannya tetap sebesar Rp. 198.500.000,-. Target indikator jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan tidak mengalami perubahan, yaitu 12 laporan.
- 7.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Terdapat pengurangan pagu sebesar Rp. 11.216.385,- dari pagu awal Rp. 59.350.000,- menjadi Rp. 48.133.615,-, pengurangan pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer. Target indikator kinerja jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan tidak mengalami perubahan,

yaitu 4 laporan.

- 7.4 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, adanya penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 105.065.452,- dari pagu awal sebesar Rp. 1.411.416.370,- menjadi Rp. 1.516.481.822,- dikarenakan adanya penambahan belanja jasa tenaga pelayanan umum. Target indikator jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan tidak mengalami perubahan, yaitu 12 laporan.
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Target Indikator Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100%. Indikatornya berubah menjadi Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar (%) 100%
- 8.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, tidak ada penambahan pagu anggaran, tetap sebesar Rp. 304.330.000,-. Target indikator jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya, yaitu sebanyak 30 unit.
- 8.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, kegiatan ini pada tahun ini adalah kegiatan baru dengan pagu sebesar Rp. 148.740.000,-. Target indikator jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya, yaitu sebanyak 15 unit.
- 8.3 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 15.892.425,-, dari pagu awal Rp. 26.283.730,- menjadi Rp. 42.176.155,- untuk belanja modal komputer unit lainnya. Target indikator jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara yaitu sebanyak 21 unit.
- 7.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya, terdapat pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 911.536.900,- dari pagu awal Rp. 1.160.817.300,- menjadi Rp. 249.280.400,- untuk belanja Rehab Ruang Bawah/Lantai satu, Pengawasan Ruang Bawah/Lantai satu, Parkir Modern Bapenda, dan Pengawasan Parkir. Target indikator jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi tidak mengalami perubahan, yaitu 1 unit.

2. Program Pengelola Pendapatan Daerah dengan indikator awal Persentase

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 33.68%, Persentase Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 40.26%, Persentase SKPD Pengelola PAD yang Mencapai Target 46%. Pada Program Pengelola Pendapatan Daerah terdapat perubahan indikator, yaitu : Persentase Kenaikan Jumlah Wajib Pajak 2%, Persentase Pemutakhiran Data Objek Pajak 100%, Persentase Terlaksananya Penetapan Pajak Daerah 100%, Pengembangan dan Analisis Kebijakan Pajak Daerah 100%, Persentase Piutang Pajak yang Tertagih 100%, Persentase Transaksi Pajak Daerah yang dilakukan secara Non Tunai 100%, Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah 100%, Persentase Perangkat Daerah unit PAD yang dilakukan pembinaan dan pengawasan (%) 100%, Persentase alat rekam data pajak daerah yang diawasi dan dilaporkan tepat waktu (%) 100%

1) Kegiatan Pengelola Pendapatan Daerah dengan Indikator Jumlah Pajak Daerah Rp. 89.702.895.585,-, Jumlah Retribusi Daerah Rp. 107.240.699.089,-, Jumlah OPD Pengelola Retribusi yang Mencapai Target 7 dari 13 PD. Terdapat perubahan indikator menjadi Jumlah Wajib Pajak Baru 150 WP, Persentase Data Objek Pajak yang Dimutakhirkan 100%, Persentase Realisasi Penetapan Pajak Daerah 100%, Persentase tersusunnya dokumen rencana, analisis, dan kebijakan pajak daerah 100%, Persentase terselesaikannya Piutang Pajak Daerah 100%, Persentase Kanal Pembayaran Pajak Non Tunai yang Tersedia 100%, Persentase pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah 100%, Jumlah Perangkat Daerah unit PAD yang dilakukan pembinaan dan pengawasan 100%, Jumlah alat rekam data pajak daerah yang diawasi dan dilaporkan 612 Unit.

1.1 Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, terdapat pengurangan pagu anggaran dari pagu awal Rp. 155.887.684,- menjadi Rp. 66.895.684,-. Target indikator Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah tidak mengalami perubahan, tetap 4 Dokumen.

1.2 Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, adanya penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 297.179.700,- dari pagu sebelumnya Rp. 523.848.000,- menjadi Rp. 821.027.700,- Adapun penambahan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak, belanja makanan dan minuman rapat, belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan, belanja jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa khusus, belanja perjalanan dinas biasa. Target indikator jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah mengalami perubahan, dari 4 dokumen menjadi 7 dokumen.

1.3 Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, terdapat penambahan pagu sebesar Rp. 153.462.983,-, dari

pagu awal Rp. 521.416.518,- menjadi Rp. 674.879.501,-. Penambahan anggaran untuk penambahan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya, belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat. Target indikator jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah tidak mengalami perubahan, yaitu 4 laporan

- 1.4 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, terdapat pengurangan pagu sebesar Rp. 64.060.884,-, dari pagu awal Rp. 312.821.187,- menjadi Rp. 248.760.303,-. Pengurangan anggaran untuk belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi, belanja modal komputer, belanja modal peralatan komputer lainnya. Target indikator jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah sebanyak 136 unit.
- 1.5 Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 2.986.000,- dari pagu awal sebesar Rp. 90.630.000,- menjadi Rp. 93.616.000,- untuk Penambahan belanja fotocopy, belanja perjalanan dinas dalam kota. Target indikator jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah tidak mengalami perubahan, tetap 4 laporan.
- 1.6 Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, terdapat pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 3.654.000,- dari pagu awal sebesar Rp. 388.233.000,- menjadi Rp. 384.579.000,- Adapun pengurangan untuk belanja ATK, Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Untuk target indikator jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah mengalami perubahan, dari 22 laporan menjadi 24 laporan.
- 1.7 Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), adanya pengurangan anggaran sebesar Rp. - 199.963.000,- dari sebelumnya Rp. 369.926.000,- menjadi Rp. 169.963.000,- untuk pengurangan belanja perjalanan dinas biasa, belanja perjalanan dinas dalam kota. Target indikator jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya mengalami perubahan, dari 2.838 OP menjadi 2.722 OP.
- 1.8 Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak, terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 357.917.483,- dari pagu awal sebesar Rp. 126.027.012,- menjadi Rp. 483.944.495,- untuk Penambahan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja

alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya, belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain. Target indikator jumlah dokumen ketetapan pajak daerah mengalami perubahan, sebelumnya 132 dokumen menjadi 180 dokumen.

- 1.9 Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 322.127.400,- dari pagu awal Rp. 135.764.000,- menjadi Rp. 457.891.400,-. Penambahan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor, honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia, belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan, belanja perjalanan dinas biasa dan belanja modal peralatan komputer lainnya. Target indikator jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah tidak mengalami perubahan, 12.514 layanan.
- 1.10 Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, adanya penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 852.811.898,- dari pagu sebelumnya Rp. 266.440.906,- menjadi Rp. 1.119.252.804,- untuk Penambahan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan dinas, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya, belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, belanja makanan dan minuman rapat, honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia, belanja jasa tenaga pelayanan umum, belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan, belanja perjalanan dinas biasa, belanja perjalanan dinas dalam kota. Target indikator jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi tidak ada perubahan, 13.750 OP.
- 1.11 Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah, terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 171.686.135,- dari pagu awal sebesar Rp. 719.812.450,- menjadi Rp. 891.498.585,- dikarenakan adanya Penambahan untuk belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, belanja makanan dan minuman rapat, honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia, belanja perjalanan dinas dalam kota. Target indikator jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah tidak mengalami

perubahan, tetap sebanyak 4 dokumen.

- 1.12 Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, terdapat pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 155.056.000,- menjadi Rp. 27.262.000,- pengurangan untuk belanja perjalanan dinas biasa dan belanja perjalanan dinas dalam kota. Target indikator jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah tidak mengalami perubahan, tetap sebanyak 4 dokumen.
- 1.13 Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 24.457.200,- dari pagu awal Rp. 322.051.940,- menjadi Rp. 346.509.140,- untuk Penambahan belanja jasa penyelenggaraan acara. Target indikator jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah mengalami perubahan, dari 5 dokumen menjadi 4 dokumen.
- 1.14 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 491.632.400,-, dari pagu awal Rp. 86.574.000,- menjadi Rp. 578.206.400,- dikarenakan adanya Penambahan untuk belanja bahan cetak, belanja baju rompi, belanja makan minum rapat, honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia, honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan, belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan, belanja perjalanan dinas biasa. Target indikator jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah 4 laporan.
- 1.15 Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. Terdapat pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 36.733.262,- dari pagu awal Rp. 100.800.000,- menjadi Rp. 64.066.738,- untuk Pengurangan bahan cetak, belanja perjalanan dinas biasa. Target indikator Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah tidak mengalami perubahan, tetap 4 laporan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Rekapitulasi Daftar Perubahan Program dan Perubahan Kegiatan
pada Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (Tahun Berjalan)												Perkiraan Maju (Renja Tahun 2026) (RANWAL)		Jenis Keg. *)	Unit SKPD Penanggun g jawab	Alasan Perubahan
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana							
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelu m Perubah an	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)=12-11	14	15	16	17	18	19	20	
5	URUSAN PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
5.02	KEUANGAN																			
5.02.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI AKIP	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	-	BAPENDA	BAPENDA	BB (80,2)	100%	24.661.667.691	20.377.472.436	-4.284.195.255	0	0	0	18.436.449.000	0	0	0	
		Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kesekretariatan						100%							100%	18.436.449.000		SEKRETARIA T		
5.02.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja (%)	-	-	BAPENDA	BAPENDA	33 Dok	100%	117.648.000	107.928.000	-9.720.000	0	0	0	27.000.000	0	0	0	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu						33 Dok							100%	27.000.000		SEKRETARIA T		

Rancangan Akhir Rencana Kerja 2025 I Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (Tahun Berjalan)											Perkiraan Maju (Renja Tahun 2026) (RANWAL)		Jenis Keg. *)	Unit SKPD Penanggun g jawab	Alasan Perubahan
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana						
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelu m Perubah an	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)=12-11	14	15	16	17	18	19	20
5.02.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	BAPENDA	BAPENDA	9 Dok	9 Dok	21.178.000	18.938.000	-2.240.000	APBD	APBDP	9 Dok	10.000.000			Mengurangi belanja makan minum rapat 2.240.000 ke sub kegiatan pengadaan pakaian dinas untuk penambahan belanja perlengkapan dinas (Baju Napak Tilas, Pakaian Dinas untuk Honorer/ P3K, Belanja Pakaian Batik Tradisional dan Belanja Pakaian Olahraga)
5.02.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	BAPENDA	BAPENDA	1 Dok	1 Dok	1.600.000	500.000	-1.100.000	APBD	APBDP	1 Dok	1.000.000			Mengurangi belanja makan minum rapat 640.000 dan belanja cetak 460.000 total 1.100.000 ke sub kegiatan pengadaan pakaian dinas untuk penambahan belanja perlengkapan dinas (Baju Napak Tilas, Pakaian Dinas untuk Honorer/ P3K, Belanja Pakaian Batik Tradisional dan Belanja Pakaian Olahraga)
5.02.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	BAPENDA	BAPENDA	1 Dok	1 Dok	1.600.000	500.000	-1.100.000	APBD	APBDP	1 Dok	1.000.000			Mengurangi belanja makan minum rapat 640.000 dan belanja cetak 460.000 total 1.100.000 ke sub kegiatan pengadaan pakaian dinas untuk penambahan belanja perlengkapan dinas (Baju Napak Tilas, Pakaian Dinas untuk Honorer/ P3K, Belanja Pakaian Batik Tradisional dan Belanja Pakaian Olahraga)
5.02.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	BAPENDA	BAPENDA	1 Dok	1 Dok	2.000.000	1.360.000	-640.000	APBD	APBDP	1 Dok	1.000.000			Mengurangi belanja makan minum rapat 640.000 ke sub kegiatan pengadaan pakaian dinas untuk penambahan belanja perlengkapan dinas (Baju Napak Tilas, Pakaian Dinas untuk Honorer/ P3K, Belanja Pakaian Batik Tradisional dan Belanja Pakaian Olahraga)
5.02.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	BAPENDA	BAPENDA	1 Dok	1 Dok	2.000.000	2.000.000	0	APBD	APBDP	1 Dok	1.000.000			

Rancangan Akhir Rencana Kerja 2025 I Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (Tahun Berjalan)												Perkiraan Maju (Renja Tahun 2026) (RANWAL)		Jenis Keg. *)	Unit SKPD Penanggun g jawab	Alasan Perubahan
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana							
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelu m Perubah an	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	{13}=12-11	14	15	16	17	18	19	20	
5.02.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	BAPENDA	BAPENDA	8 Dok	8 Dok	3.000.000	760.000	-2.240.000	APBD	APBDP	8 Dok	1.000.000			Mengurangi belanja makan minum rapat 2.240.000 ke sub kegiatan pengadaan pakaian dinas untuk penambahan belanja perlengkapan dinas (Baju Napak Tilas, Pakaian Dinas untuk Honoror/ P3K, Belanja Pakaian Batik Tradisional dan Belanja Pakaian Olahraga)	
5.02.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	BAPENDA	BAPENDA	10 Dok	10 Dok	84.270.000	83.150.000	-1.120.000	APBD	APBDP	10 Dok	10.000.000			Mengurangi belanja makan minum rapat 1.120.000 ke sub kegiatan pengadaan pakaian dinas untuk penambahan belanja perlengkapan dinas (Baju Napak Tilas, Pakaian Dinas untuk Honoror/ P3K, Belanja Pakaian Batik Tradisional dan Belanja Pakaian Olahraga)	
5.02.01.2.0 1.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	BAPENDA	BAPENDA	1 Dok	1 Dok	1.000.000	360.000	-640.000	APBD	APBDP	1 Dok	1.000.000			Mengurangi belanja makan minum rapat 640.000 ke sub kegiatan pengadaan pakaian dinas untuk penambahan belanja perlengkapan dinas (Baju Napak Tilas, Pakaian Dinas untuk Honoror/ P3K, Belanja Pakaian Batik Tradisional dan Belanja Pakaian Olahraga)	
5.02.01.2.0 1.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	BAPENDA	BAPENDA	1 Data	1 Data	1.000.000	360.000	-640.000	APBD	APBDP	1 Data	1.000.000			Mengurangi belanja makan minum rapat 640.000 ke sub kegiatan pengadaan pakaian dinas untuk penambahan belanja perlengkapan dinas (Baju Napak Tilas, Pakaian Dinas untuk Honoror/ P3K, Belanja Pakaian Batik Tradisional dan Belanja Pakaian Olahraga)	
5.02.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu (%)			BAPENDA	BAPENDA	44 Dokumen	100%	19.745.393.003	16.009.174.046	-3.736.218.957	0	0	0	15.976.325.000	0	0		
		Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						44 Dokumen							100%	15.976.325.000		SEKRETARIA T		

Rancangan Akhir Rencana Kerja 2025 I Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (Tahun Berjalan)												Perkiraan Maju (Renja Tahun 2026) (RANWAL)		Jenis Keg. *)	Unit SKPD Penanggun g jawab	Alasan Perubahan
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana							
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelu m Perubah an	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)=12-11	14	15	16	17	18	19	20	
5.02.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	BAPENDA	BAPENDA	32 Org/ Bln	32 Org/ Bln	19.692.543.957	15.956.325.000	-3.736.218.957	APBD	APBDP	32 Org/ Bln	15.956.325.000			Menggeser dana titipan opsen, dimasukkan ke beberapa Sub Kegiatan	
5.02.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	BAPENDA	BAPENDA	1 Laporan	1 Laporan	36.855.046	36.855.046	0	APBD	APBDP	1 Laporan	10.000.000				
5.02.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	BAPENDA	BAPENDA	18 Laporan	18 Laporan	15.994.000	15.994.000	0	APBD	APBDP	18 Laporan	10.000.000			Mengurangi belanja makan minum rapat 4.480.000 ke sub kegiatan pengadaan pakaian dinas untuk penambahan belanja perlengkapan dinas (Baju Napak Tilas, Pakaian Dinas untuk Honorer/ P3K, Belanja Pakaian Batik Tradisional dan Belanja Pakaian Olahraga)	
5.02.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadministrasia n Barang Milik Daerah	Persentase pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD) yang akurat lengkap dan mutakhir (%)	-	-	BAPENDA	BAPENDA	100%	100%	17.522.000	47.967.119	30.445.119	0	0	0	6.000.000	0	0	0	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah					100%							100%	6.000.000		SEKRETARIA T			
5.02.01.2.0 3.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	BAPENDA	BAPENDA	60 Dok	60 Dok	2.000.000	2.000.000	0	APBD	APBDP	60 Dok	2.000.000				

Rancangan Akhir Rencana Kerja 2025 I Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (Tahun Berjalan)												Perkiraan Maju (Renja Tahun 2026) (RANWAL)		Jenis Keg. *)	Unit SKPD Penanggun g jawab	Alasan Perubahan
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana							
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelu m Perubah an	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)=12-11	14	15	16	17	18	19	20	
5.02.01.2.0 3.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	BAPENDA	BAPENDA	25 Laporan	25 Laporan	8.022.000	41.430.000	33.408.000	APBD	APBDP	25 Laporan	2.000.000			Penambahan 36.307.720 dari Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD untuk penambahan belanja SPPD	
5.02.01.2.0 3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	BAPENDA	BAPENDA	65 Laporan	65 Laporan	7.500.000	4.537.119	-2.962.881	APBD	APBDP	65 Laporan	2.000.000			Map odner 25 buah dan kertas 23 rim pindah ke Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
5.02.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi (%)			BAPENDA	BAPENDA	100%	100%	282.785.996	295.714.232	12.928.236	0	0	0	100.000.000	0	0	0	
		Terlaksananya Pengadministrasia n Kepegawaian Perangkat Daerah						100%							100%	100.000.000		SEKRETARIA T		

Rancangan Akhir Rencana Kerja 2025 I Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (Tahun Berjalan)												Perkiraan Maju (Renja Tahun 2026) (RANWAL)		Jenis Keg. *)	Unit SKPD Penanggun g jawab	Alasan Perubahan
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana							
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelu m Perubah an	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)=12-11	14	15	16	17	18	19	20	
5.02.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	ASN dan Tenaga Kontrak pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	ASN dan Tenaga Kontrak pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	BAPENDA	BAPENDA	5 Paket	5 Paket	157.785.996	170.714.232	12.928.236	APBD	APBDP	2 Paket	50.000.000			9.720.000 penambahan dari perencanaan, 4.480.000 dr keuangan, penambahan dari penataan arsip dinamis SKPD 12.692.280, digeser ke sub kegiatan pengadaan pakaian dinas untuk penambahan belanja perlengkapan dinas (Baju Napak Tilas, Pakaian Dinas untuk Honorer/ P3K, Belanja Pakaian Batik Tradisional dan Belanja Pakaian Olahraga)	
5.02.01.2.0 5.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	ASN dan Tenaga Kontrak pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	ASN dan Tenaga Kontrak pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	BAPENDA	BAPENDA	20 Org	20 Org	125.000.000	125.000.000	0	APBD	APBDP	10 Org	50.000.000				
5.02.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP (%)	-	-	BAPENDA	BAPENDA	100%	100%	1.082.560.888	1.215.022.077	132.461.189	0	0	0	450.824.800	0	0	0	

Rancangan Akhir Rencana Kerja 2025 I Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (Tahun Berjalan)												Perkiraan Maju (Renja Tahun 2026) (RANWAL)		Jenis Keg. *)	Unit SKPD Penanggun g jawab	Alasan Perubahan
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana							
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelu m Perubah an	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)=12-11	14	15	16	17	18	19	20	
		Terlaksananya Pengadministrasia n Umum Perangkat Daerah						100%							100%	450.824.800		SEKRETARIA T		
5.02.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	BAPENDA	BAPENDA	4 Paket	4 Paket	26.688.570	30.708.900	4.020.330	APBD	APBDP	4 Paket	20.824.800				
5.02.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	BAPENDA	BAPENDA	4 Paket	4 Paket	254.109.405	271.868.895	17.759.490	APBD	APBDP	4 Paket	50.000.000			Kompor mata 1 pada Belanja Perabot Kantor hapus dan pindahkan menjadi kertas HVS pada Belanja Kertas dan Cover, penambahan Belanja map odner 25 buah dan kertas 23 rim dari Sub Kegiatan Penatausahaan Barang, penambahan 10.000.000 (belanja tooner pagu dari sub kegiatan penetapan)	
5.02.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	BAPENDA	BAPENDA	4 Paket	4 Paket	102.712.429	103.868.798	1.156.369	APBD	APBDP	4 Paket	15.000.000				
5.02.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	BAPENDA	BAPENDA	4 Dok	4 Dokumen	17.200.000	18.200.000	1.000.000	APBD	APBDP	4 Dok	10.000.000			Penambahan 1.000.000 dari penatausahaan arsip dinamis SKPD untuk Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah	
5.02.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	BAPENDA	BAPENDA	68 Laporan	68 Laporan	431.900.484	590.425.484	158.525.000	APBD	APBDP	100 Laporan	350.000.000				

Rancangan Akhir Rencana Kerja 2025 I Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (Tahun Berjalan)												Perkiraan Maju (Renja Tahun 2026) (RANWAL)		Jenis Keg. *)	Unit SKPD Penanggung jawab	Alasan Perubahan
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana							
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)=12-11	14	15	16	17	18	19	20	
5.02.01.2.0 6.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	BAPENDA	BAPENDA	4 Dokumen	1 Dokumen	249.950.000	199.950.000	-50.000.000	APBD	APBDP	4 Dokumen	5.000.000			Pengurangan 50,000,000 pindah ke langganan koran 1.000.000 dan pindah ke perjadin BMD 36.307.720 pindah ke pakaian dinas 12.692.280 sub kegiatan pengadaan pakaian dinas untuk penambahan belanja perlengkapan dinas (Baju Napak Tilas, Pakaian Dinas untuk Honorer/ P3K, Belanja Pakaian Batik Tradisional dan Belanja Pakaian Olahraga)	
5.02.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan (%)	-	-	BAPENDA	BAPENDA	12 Bulan	100%	114.580.519	206.961.125	92.380.606	0	0	0	51.000.000	0	0		
		Tersedianya Barang Milik Daerah						12 Bulan							100%	51.000.000		SEKRETARIAT		
5.02.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	BAPENDA	BAPENDA	2 Unit	2 Unit	26.283.730	42.176.155	15.892.425	APBD	APBDP	2 Unit	26.000.000				
5.02.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	BAPENDA	BAPENDA	13 Unit	14 Unit	88.296.789	164.784.970	76.488.181	APBD	APBDP	5 Unit	25.000.000			Penambahan belanja Opsen 112.815.517 dan belanja laptop sekretariat untuk inovasi tamu 15.892.425	
5.02.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan (%)	-	-	BAPENDA	BAPENDA	12 Bulan	100%	1.666.449.985	1.771.515.437	105.065.452	0	0	0	1.429.459.200	0	0		
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12 Bulan								100%	1.429.459.200		SEKRETARIAT	

Rancangan Akhir Rencana Kerja 2025 I Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (Tahun Berjalan)												Perkiraan Maju (Renja Tahun 2026) (RANWAL)		Jenis Keg. *)	Unit SKPD Penanggung g jawab	Alasan Perubahan
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana							
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelu m Perubah an	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)=12-11	14	15	16	17	18	19	20	
5.02.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	BAPENDA	BAPENDA	4 Laporan	4 Laporan	8.400.000	8.400.000	0	APBD	APBDP	4 Laporan	8.400.000				
5.02.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	BAPENDA	BAPENDA	12 Laporan	12 Laporan	198.500.000	198.500.000	0	APBD	APBDP	12 Laporan	198.500.000				
5.02.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	BAPENDA	BAPENDA	4 Laporan	4 Laporan	48.133.615	48.133.615	0	APBD	APBDP	4 Laporan	25.000.000				
5.02.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	BAPENDA	BAPENDA	12 Laporan	12 Laporan	1.411.416.370	1.516.481.822	105.065.452	APBD	APBDP	12 Laporan	1.197.559.200			Penambahan 2 orang tenaga kebersihan outsourcing @2.500.000 x 13 bulan	
5.02.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar (%)	-	-	BAPENDA	BAPENDA	100%	100%	1.634.727.300	723.190.400	-911.536.900	0	0	0	395.840.000	0	0	0	
5.02.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	BAPENDA	BAPENDA	30 Unit	30 Unit	304.330.000	304.330.000	0	APBD	APBDP	30 Unit	250.000.000				
5.02.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	BAPENDA	BAPENDA	15 Unit	15 Unit	148.740.000	148.740.000	0	APBD	APBDP	15 Unit	100.000.000				

Rancangan Akhir Rencana Kerja 2025 I Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (Tahun Berjalan)												Perkiraan Maju (Renja Tahun 2026) (RANWAL)		Jenis Keg. *)	Unit SKPD Penanggun g jawab	Alasan Perubahan
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana							
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelu m Perubah an	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)=12-11	14	15	16	17	18	19	20	
5.02.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	BAPENDA	BAPENDA	21 Unit	21 Unit	20.840.000	20.840.000	0	APBD	APBDP	5 Unit	20.840.000				
5.02.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabili tasi gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	BAPENDA	BAPENDA	1 Unit	1 Unit	1.160.817.300	249.280.400	-911.536.900	APBD	APBDP	1 Unit	25.000.000				
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Konstibusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kenaikan Jumlah Wajib Pajak (%)	-	-	BAPENDA	BAPENDA	53,33%	2%	3.162.513.223	6.498.951.578	3.336.438.355	APBD	APBDP	2%	1.411.774.000		BIDANG		
		Persentase Konstibusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pemutakhiran Data Objek Pajak	-	-			27,25%	100%						100%					
		Persentase SKPD pengelola PAD yang mencapai target (%)	Persentase Terlaksananya Penetapan Pajak Daerah	-	-			50%	100%						100%					
		Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Target	Persentase Pengembangan dan Analisis Kebijakan Pajak Daerah					100%	100%						100%					
			Persentase Piutang Pajak yang Tertagih						100%						100%					
			Persentase Transaksi Pajak Daerah yang dilakukan secara Non Tunai						100%						100%					
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah						100%						100%					
			Persentase Perangkat Daerah unit PAD yang dilakukan pembinaan dan pengawasan						100%						100%					
			Persentase alat rekam data pajak daerah yang diawasi dan dilaaporkan teoat						100%						100%					

Rancangan Akhir Rencana Kerja 2025 I Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (Tahun Berjalan)												Perkiraan Maju (Renja Tahun 2026) (RANWAL)		Jenis Keg. *)	Unit SKPD Penanggun g jawab	Alasan Perubahan
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana							
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelu m Perubah an	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)=12-11	14	15	16	17	18	19	20	
			waktu																	
5.02.04.2.0 1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Baru	-	-	BAPENDA	BAPENDA	136.191.50 0.000	150 WP	3.162.513.223	6.498.951.578	3.336.438.355	APBD	APBDP				BIDANG		
		Jumlah Retribusi Daerah	Persentase Data Objek Pajak yang Dimutakhirkan	-	-	BAPENDA	BAPENDA	95.983.969. 998	100%											
		Jumlah PD pengelola retribusi yang mencapai target	Persentase Realisasi Penetapan Pajak Daerah		-	BAPENDA	BAPENDA	7 PD dari 14 Pengampu	100%											
		Jumlah Wajib Pajak Baru	Persentase tersusunnya dokumen rencana, analisis, dan kebijakan pajak daerah			BAPENDA	BAPENDA	150 WP	100%						280 WP	1.411.774.000		BIDANG		
		Realisasi Wajib Pajak yang Memenuhi Kewajiban Perpajakannya	Persentase Tersesalkannya Piutang Pajak Daerah			BAPENDA	BAPENDA	100%	100%						100%					
		Realisasi Data Objek Pajak yang Dimutakhirkan	Persentase Kanal Pembayaran Pajak Non Tunai yang Tersedia			BAPENDA	BAPENDA	100%	100%						100%					
		Realisasi Penetapan Pajak Daerah	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah			BAPENDA	BAPENDA	100%	100%						100%					
		Persentase Tersesalkannya Piutang Pajak Daerah	Jumlah Perangkat Daerah unit PAD yang dilakukan pembinaan dan pengawasan			BAPENDA	BAPENDA	100%	144 PD						100%					
		Realisasi Manajemen Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase alat rekam data pajak daerah yang diawasi dan dilaporkan tepat waktu			BAPENDA	BAPENDA	100%	100%						100%					
		Terlaksananya Pengelolaan Pajak Daerah Berbasis Teknologi Informasi				BAPENDA	BAPENDA	100%							100%					
		Realisasi Pembinaan dan Pengawasan PAD				BAPENDA	BAPENDA	100%							100%					

Rancangan Akhir Rencana Kerja 2025 I Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (Tahun Berjalan)												Perkiraan Maju (Renja Tahun 2026) (RANWAL)		Jenis Keg. *)	Unit SKPD Penanggun g jawab	Alasan Perubahan
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana							
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelu m Perubah an	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)=12-11	14	15	16	17	18	19	20	
5.02.04.2.0 1.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Wajib Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak, Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan Objek Retribusi	Wajib Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak	BAPENDA	BAPENDA	4 Dok	7 Dok	26.095.684	66.895.684	40.800.000	APBD	APBDP	4 Dok	10.200.000			Penambahan untuk Kegiatan Sinergi Pengelolaan Opsen PKB- BBNKB dengan Samsat	
5.02.04.2.0 1.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Wajib Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak,	Wajib Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak	BAPENDA	BAPENDA	6 Dok	12 Dok	473.480.000	832.736.700	359.256.700	APBD	APBDP	6 Dok	350.000.000			Penambahan untuk Kegiatan Sinergi Pengelolaan Opsen PKB- BBNKB dengan Samsat	
5.02.04.2.0 1.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Wajib Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak Daerah dan Perangkat Daerah Pengampu Retribusi Kab. Tabalong	Wajib Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak	BAPENDA	BAPENDA	4 Laporan	4 Laporan	465.258.518	674.879.501	209.620.983	APBD	APBDP	4 Laporan	100.000.000			Penambahan untuk Kegiatan Sinergi Pengelolaan Opsen PKB- BBNKB dengan Samsat	
5.02.04.2.0 1.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Wajib Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak,	Wajib Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak,	BAPENDA	BAPENDA	101 Unit	101 Unit	248.760.303	248.760.303	0	APBD	APBDP	1 Unit	10.000.000				
5.02.04.2.0 1.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Wajib Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak, Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan Objek Retribusi	Wajib Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak,	BAPENDA	BAPENDA	4 Laporan	4 Laporan	49.904.000	93.616.000	43.712.000	APBD	APBDP	4 Laporan	60.000.000			Penambahan untuk Kegiatan Sinergi Pengelolaan Opsen PKB- BBNKB dengan Samsat	
5.02.04.2.0 1.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Wajib Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak, Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan Objek Retribusi	Wajib Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak,	BAPENDA	BAPENDA	24 Laporan	24 Laporan	321.060.000	384.779.000	63.719.000	APBD	APBDP	24 Laporan	85.000.000			Penambahan untuk Kegiatan Sinergi Pengelolaan Opsen PKB- BBNKB dengan Samsat	

Rancangan Akhir Rencana Kerja 2025 I Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (Tahun Berjalan)												Perkiraan Maju (Renja Tahun 2026) (RANWAL)		Jenis Keg. *)	Unit SKPD Penanggun g jawab	Alasan Perubahan
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana							
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelu m Perubah an	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)=12-11	14	15	16	17	18	19	20	
5.02.04.2.0 1.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Wajib Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak, Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan Objek Retribusi	Wajib Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak, Objek Pajak,	BAPENDA	BAPENDA	2722 OP	2722 OP	169.963.000	169.963.000	0	APBD	APBDP	2722 OP	90.000.000				
5.02.04.2.0 1.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Wajib Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak, Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan Objek Retribusi	Wajib Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak, Objek Pajak,	BAPENDA	BAPENDA	180 Dok	180 Dok	126.027.012	491.679.323	365.652.311	APBD	APBDP	180 Dok	85.000.000			Penambahan untuk Kegiatan Sinergi Pengelolaan Opsen PKB- BBNKB dengan Samsat	
5.02.04.2.0 1.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Wajib Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak, Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan Objek Retribusi	Wajib Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak,	BAPENDA	BAPENDA	12514 Layanan	12514 Layanan	74.213.200	508.346.400	434.133.200	APBD	APBDP	12514 Layanan	75.000.000			Penambahan untuk Kegiatan Sinergi Pengelolaan Opsen PKB- BBNKB dengan Samsat	
5.02.04.2.0 1.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Wajib Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak, Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan Objek Retribusi	Wajib Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak,	BAPENDA	BAPENDA	13750 Dok	13750 Dok	222.293.178	1.119.552.804	897.259.626	APBD	APBDP	14000 Dok	90.000.000			Penambahan untuk Kegiatan Sinergi Pengelolaan Opsen PKB- BBNKB dengan Samsat	
5.02.04.2.0 1.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Wajib Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak, Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan Objek Retribusi	Wajib Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak,	BAPENDA	BAPENDA	4 Dok	4 Dok	593.386.450	891.498.585	298.112.135	APBD	APBDP	4 Dok	125.000.000			Penambahan untuk Kegiatan Sinergi Pengelolaan Opsen PKB- BBNKB dengan Samsat	
5.02.04.2.0 1.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Wajib Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak, Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan Objek Retribusi	Wajib Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak,	BAPENDA	BAPENDA	4 Dok	4 Dok	27.262.000	27.262.000	0	APBD	APBDP	4 Dok	80.000.000				

Rancangan Akhir Rencana Kerja 2025 I Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (Tahun Berjalan)												Perkiraan Maju (Renja Tahun 2026) (RANWAL)		Jenis Keg. *)	Unit SKPD Penanggun g jawab	Alasan Perubahan
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana							
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelu m Perubah an	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)=12-11	14	15	16	17	18	19	20	
5.02.04.2.0 1.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Wajib Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak,	Wajib Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak,	BAPENDA	BAPENDA	4 Dok	4 Dok	260.009.140	346.709.140	86.700.000	APBD	APBDP	4 Dok	85.000.000			Penambahan untuk Kegiatan Sinergi Pengelolaan Opsen PKB- BBNKB dengan Samsat (Pengembangan E Penda)	
5.02.04.2.0 1.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Wajib Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak, Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan Objek Retribusi	Wajib Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak, Pengampu Retribusi	BAPENDA	BAPENDA	4 Laporan	4 Laporan	40.734.000	578.206.400	537.472.400	APBD	APBDP	4 Laporan	86.574.000			Penambahan untuk Kegiatan Sinergi Pengelolaan Opsen PKB- BBNKB dengan Samsat	
5.02.04.2.0 1.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Wajib Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak, Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan Objek Retribusi	Wajib Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak,	BAPENDA	BAPENDA	4 Laporan	4 Laporan	64.066.738	64.066.738	0	APBD	APBDP	2 Laporan	80.000.000				
										27.824.180.914	26.876.424.014	-947.756.900				19.848.223.000			Selisih merupakan pergeseran rehabilitasi Gedung kantor. Anggarannya digeser ke PU	

Sumber : Data diolah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong

BAB IV PENUTUP

Penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong berdasarkan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Perubahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
2. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, acuan, arahan dalam melaksanakan program, kegiatan, arah, tujuan dan strategi kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong dalam kurun waktu tahun berjalan tahun 2025;
3. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun agar lebih terukur dan terarah.

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur sipil negara di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tabalong Terdepan.

Tanjung, 03 Juli 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tabalong,

Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19720306 199203 1 004

